

**DIPLOMASI BILATERAL INDONESIA KE ARAB SAUDI DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Politik pada Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Andalas*

Oleh

MUHAMMAD FAIZUL HAFIZI

2010855001



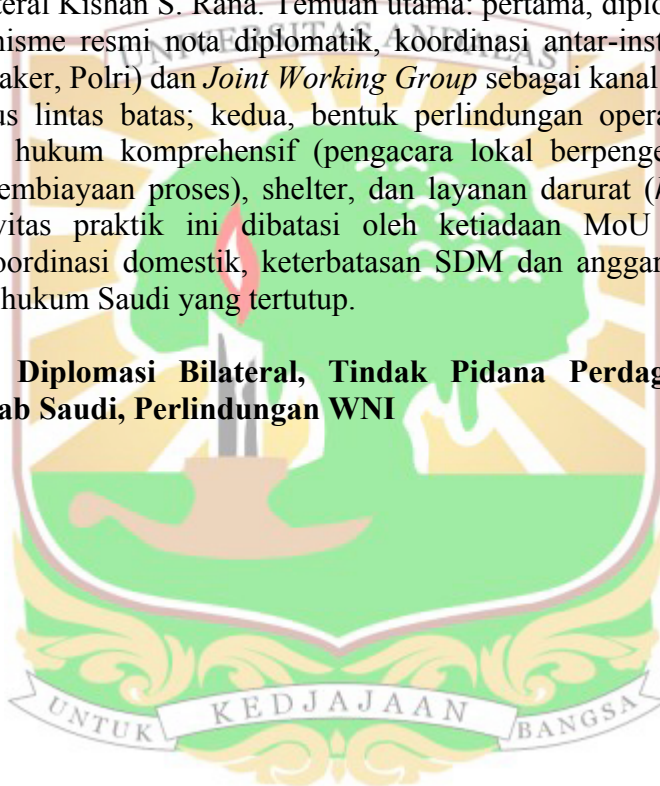
**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah diplomasi bilateral Indonesia - Arab Saudi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya kasus yang melibatkan WNI, kerentanan pekerja rumah tangga akibat sistem *kafala*, dan lemahnya pencegahan hulu. Walaupun Indonesia telah membentuk badan khusus untuk melayani PMI yang ingin berkeja keluar negeri, yaitu BP2MI, namun masih banyak PMI yang berangkat secara non-prosedural dan angka pelanggaran hak mereka yang masih tinggi. Penelitian ini meneliti diplomasi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen; analisis dipandu oleh kerangka diplomasi bilateral Kishan S. Rana. Temuan utama: pertama, diplomasi dijalankan melalui mekanisme resmi, nota diplomatik, koordinasi antar-institusi (Kemenlu, BP2MI, Kemnaker, Polri) dan *Joint Working Group* sebagai kanal komunikasi dan notifikasi kasus lintas batas; kedua, bentuk perlindungan operasional meliputi pendampingan hukum komprehensif (pengacara lokal berpengetahuan syariah, penerjemah, pembiayaan proses), shelter, dan layanan darurat (*hotline* 24 jam); ketiga, efektivitas praktik ini dibatasi oleh ketiadaan MoU khusus TPPO, fragmentasi koordinasi domestik, keterbatasan SDM dan anggaran KBRI-KJRI, serta birokrasi hukum Saudi yang tertutup.

Kata Kunci: Diplomasi Bilateral, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia, Arab Saudi, Perlindungan WNI



ABSTRACT

This study examines Indonesia's bilateral diplomacy with Saudi Arabia in addressing the crime of Trafficking in Persons (TIP). The study is motivated by the high number of TIP cases and violations of Indonesian citizens' rights in Saudi Arabia, particularly those related to irregular migration and labor exploitation. This research aims to analyze the form and implementation of Indonesia's bilateral diplomacy in handling TIP cases in Saudi Arabia. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and a literature review of academic sources and official documents. The analysis is based on Kishan S. Rana's theory of bilateral diplomacy, which emphasizes the role of direct state-to-state relations through political, economic, public diplomacy, and consular channels. The findings show that Indonesia's bilateral diplomacy is conducted through official mechanisms such as diplomatic notes, inter-agency coordination, and cooperation among diplomatic missions to provide protection for Indonesian citizens. These protection measures include legal assistance, temporary shelter, and emergency support services. Nevertheless, the implementation of bilateral diplomacy still faces structural obstacles, including the absence of a specific agreement on TIP, suboptimal cross-institutional coordination, and the limited capacity of Indonesian representatives in Saudi Arabia. Thus, Indonesia's bilateral diplomacy with Saudi Arabia is an important instrument in addressing TIP, but it still requires strengthening in order to become more effective, coordinated, and preventive.

Keywords: Bilateral Diplomacy, Trafficking in Persons, Indonesia, Saudi Arabia, Indonesian Citizens Protection, Migrant Worker

